

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk ketiga terbanyak di dunia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹ Negara Republik Indonesia juga menjunjung tinggi HAM yang menjamin segala hak warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan.² Asas persamaan kedudukan di dalam hukum merupakan asas yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, hakim harus bersifat tidak memihak. Dalam sistem “saling berhadapan” (*adversary system*) ini, pihak terdakwa yang didampingi penasehat hukum, sedangkan di pihak lain, terdapat penuntut umum yang bertindak atas nama negara. Selain penuntut umum, ada pula pihak kepolisian yang memberikan data tentang hasil penyidikan (sebelum pemeriksaan hakim).³ Selain itu terdapat juga saksi-saksi, baik yang memberatkan atau meringankan terdakwa.

Kejahatan terorisme adalah sebuah fakta yang cukup tua dalam sejarah. *The Zealots-Sicarii*, kelompok teroris yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di Judea dengan cara membunuh warga biasa pada siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa. Tindak pidana Terorisme yang merupakan tindakan setiap orang yang dengan sengaja

¹ UUD 1945 Pasal 1 ayat (3). Negara hukum yang berdasarkan Pancasila jo. Pasal 1 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman.

² Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu ; Segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. (hasil perubahan kedua)

³ Andi Hamzah, 1996, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta : CV. Saptar Artha Jaya, hal. 63.

menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.⁴

Dalam konteks Indonesia, persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di Legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik internasional, karena mengingat mayoritas korban dari tragedi bom Bali adalah orang asing. Adanya peledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan teroris telah masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia. Teror di Bali yang terjadi itu merupakan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada.⁵ Dampak yang di timbulkan dari tindak pidana terorisme meluas, bukan hanya sekedar 190 orang yang terbunuh dan 200 orang yang cedera, tetapi tragedi tersebut juga berdampak pada keluarga para korban yang sekarang kehilangan suami, anak, maupun ibu. Praktis, pasca kejadian seluruh warga pulau Bali yang mencapai hampir 2 juta orang, ikut merasakan akibatnya, para nelayan tidak dapat menjual hasil ikan tangkapannya, karena tidak ada lagi pengunjung di restoran-restoran, serta para pelayan hotel kehilangan pekerjaannya, karena berkurangnya tamu yang menginap. Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah mengidentifikasi

⁴ Pasal 6 UU nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, menjadi Undang-Undang

⁵ Abdul Wahid, et.al, 2004, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, hlm. 59.

bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Teror telah menunjukkan gerakan nyatanya sebagai tragedi atas hak asasi manusia. Eskalasi dampak destruktif yang di timbulkan telah atau banyak menyentuh multidimensi kehidupan manusia, jati diri manusia, harkat sebagai bangsa beradab dan cita-cita dapat hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam misi “kedamaian universal” telah berhasil dikalahkan oleh aksi teror. Karena demikian akrabnya aksi teror ini digunakan sebagai salah satu pilihan manusia, akhirnya teror bergeser dengan sendirinya sebagai “terorisme”. Artinya terorisme ikut ambil bagian dalam kehidupan berbangsa, hal ini untuk menunjukkan potret lain dari dan di antara berbagai jenis dan ragam kejahatan, khususnya kejahatan kekerasan, kejahatan terorganisir dan kejahatan yang tergolong luar biasa (*extraordinary crime*).

Pada dasarnya, tindak pidana terorisme adalah *extraordinary crime*. Menurut Muladi, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang membutuhkan pula penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*Extraordinary Measure*) karena berbagai hal:⁶

- a. Terorisme merupakan perbuatan yang menciptakan bahaya terbesar (*the greatest danger*) terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini hak asasi manusia untuk hidup (*the right to life*) dan hak asasi untuk bebas dari rasa takut.
- b. Target terorisme bersifat random atau *indiscriminate* yang cenderung mengorbankan orang-orang tidak bersalah.

⁶ Muladi, “Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus”, bahan seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 28 Januari 2004.

- c. Kemungkinan digunakannya senjata-senjata pemusnah massal dengan memanfaatkan teknologi modern.
- d. Kecenderungan terjadinya sinergi negatif antar organisasi terorisme nasional dengan organisasi internasional.
- e. Kemungkinan kerjasama antara organisasi teroris dengan kejahatan yang terorganisasi baik yang bersifat nasional maupun transnasional.
- f. Dapat membahayakan perdamaian dan keamanan internasional.

Terorisme sebagai kejahatan yang telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Menurut Romli Atmasasmita dalam perkembangannya kemudian dapat menimbulkan konflik yurisdiksi yang dapat mengganggu hubungan internasional antara negara-negara yang berkepentingan di dalam menangani kasus-kasus tindak pidana berbahaya yang bersifat lintas batas teritorial.⁷

Dari segi pengaturan hukum Internasional terdapat tiga konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme, yaitu :

1. *International Convention and Suppression of Terrorism*, 1973. (Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme)
2. *International Convention for the Supperssion of Terrorist Bombing* 1997. (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman Oleh Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006.

⁷ Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Bandung : PT Rafika Aditama, hlm 58.

3. *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism*

1999. (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme) disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006.

Disamping itu, terdapat kurang lebih dua belas konvensi internasional yang berkaitan dengan konvensi internasional tentang terorisme dan beberapa Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1438 tanggal 15 Oktober 2002 yang menyatakan belasungkawa dan simpati Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada Pemerintah dan rakyat Indonesia, terhadap korban dan keluarganya, serta menegaskan akan langkah-langkah untuk memberantas terorisme dan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1373 (2001) yang menyerukan kepada seluruh bangsa-bangsa untuk bekerja sama membantu Indonesia dalam menemukan dan membawa pelakunya ke pengadilan.⁸

Perangkat peraturan hukum Internasional tersebut bagi bangsa Indonesia sangat penting karena sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga sangat diperlukan peraturan perundang-undangan mengenai masalah tindak pidana terorisme. Keadaan yang mendesak menyebabkan Pemerintah Republik Indonesia sejak awal tahun 1999 telah memulai mengambil langkah-langkah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan tindak pidana terorisme. Hal ini disebabkan dalam beberapa dekade ini terorisme telah menjadi

⁸ Soeharto, 2007, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*, Bandung : PT. Refika Aditama, hal. 3-4.

fenomena umum yang terjadi di berbagai negara dan diperkirakan dapat pula terjadi di negara Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yaitu syarat "hal ikhwal kegentingan yang memaksa" bertekad segera bertindak untuk mengungkap peristiwa bom Bali dengan mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi kembali, peristiwa-peristiwa yang menelan korban jiwa dan harta benda. Untuk itu Pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan PERPU Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dikeluarkannya Perpu ini, tidak dimaksudkan untuk ditujukan kepada orang perorangan atau kelompok tertentu dalam masyarakat, tetapi ditujukan kepada siapa saja yang menjadi pelaku atau terkait dengan kegiatan tindak pidana terorisme.⁹ Penjelasan Pemerintah tersebut di atas secara mendalam dipaparkan oleh Romli Atmasasmita, bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berlandaskan kepada 6 (enam) prinsip, yaitu :¹⁰

1. *National Security*; adalah untuk mewujudkan prinsip teritorialitas dari hukum pidana sekaligus untuk melandasi pertahanan dan keamanan negara sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. *Balance of Justice*; adalah untuk menegakkan prinsip *equality before the law*, baik terhadap tersangka/terdakwa maupun terhadap korban

⁹ *Ibid*, hal 8.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Pemberantasan Terorisme Dari Aspek Hukum Pidana Internasional*, Seminar Nasional Hakikat Kebijakan Kriminal Kejahatan Terorisme, tgl 21-22 Maret 2003, hal. 13.

sehingga *due process* harus digandengkan dengan crime kontrol model dalam mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

3. *Safe Guardings Rules*; adalah prinsip yang harus dipertahankan dan dilaksanakan untuk mencegah terjadinya *abuse of power* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana ini.
4. *Safe Harbour Rule*; adalah prinsip yang diharapkan upaya untuk memberikan perlindungan kepada tersangka pelaku tindak pidana Terorisme dan prinsip ini dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diperkuat oleh ketentuan yang mengkriminalisasi perbuatan memberikan kemudahan (fasilitas) sesudah tindak pidana tersebut dilakukan (*accessories after the facts*) sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri.
5. *Sunshine Principle*; adalah prinsip yang mengedapankan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan dalam kasus pidana terorisme.
6. *Sunset Principle*; adalah prinsip yang mengadakan pembatasan waktu (time limits) terhadap kebijakan Pemerintah yang bersifat pembentukan kelembagaan khusus dan atau mekanisme khusus tertentu yang diperlukan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme.

Dalam perkembangan ketatanegaraan selanjutnya kedua buah PERPU tersebut setelah dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat pada akhirnya disetujui menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002.

Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tersebut disamping melindungi kedaulatan negara dari berbagai tindakan terorisme, negara berkewajiban melindungi tersangka pelaku terorisme sebagai wujud perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, Undang-Undang tersebut berkewajiban melindungi korban terorisme yang sebagian besar rakyat yang tidak berdosa (*innocent victims*). Pasal 34 UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahkan secara lebih rinci menetapkan bentuk perlindungan yang wajib diberikan oleh negara, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara kepada saksi, yaitu perlindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental, kerahasiaan identitas ahli, pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa. Adanya ketentuan-ketentuan semacam itu tentunya merupakan suatu langkah maju dan perwujudan dari timbulnya kesadaran bahwa dalam proses peradilan bukan hanya tersangka/terdakwa yang perlu mendapat perlindungan, meskipun masih perlu dipantau apakah ketentuan ini pada akhirnya dapat diimplementasikan, karena masih dibutuhkannya adanya Peraturan Pemerintah (PP) untuk melaksanakan ketentuan UU tersebut.¹¹ Pasal 36 ayat (1)

¹¹ fitriasih Surastrini, "Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur dan Adil, [www. Pemantau peradilan. Com](http://www.Pemantau_peradilan.Com), diunduh 28 Februari 2011, pukul 10:18:39 PM

Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme merupakan landasan hukum bagi setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi atau restitusi. Namun demikian, sampai saat ini belum ada yang mengatur pemberian kompensasi dan restitusi bagi korban, begitu pula dalam praktik peradilan kasus tindak pidana terorisme. Sekali pun akibat dari perbuatan tindak pidana terorisme telah banyak menimbulkan korban yang menderita kehilangan anggota badan, mengalami sakit ataupun sampai kehilangan nyawa. Di kaitkan dengan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban yakni Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan.¹² Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK tidak lepas dari peran kerjasama berbagai pihak terutama aparat penegak hukum. Berkaitan dengan pemberian perlindungan dan bantuan dari LPSK ini, tidak semuanya permohonan akan dikabulkan oleh LPSK.

Dalam diskusi dan pertemuan ilmiah untuk membahas naskah akademik perlindungan saksi dan korban, terdapat dua masalah yang masih menjadi perdebatan. *Pertama*, apakah ketentuan tentang perlindungan saksi dan korban ini akan berupa Undang-Undang khusus ataukah akan di inkorporasikan dalam KUHAP sebagai suatu bab tersendiri; *kedua*, tentang lembaga yang bertanggung jawab dalam masalah perlindungan saksi dan korban.

¹² Pasal 12 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Masalah pertama, sesungguhnya bukan masalah signifikan karena yang terpenting adalah kesepakatan bahwa sudah saatnya saksi dan korban diberikan perlindungan, dalam bentuk apapun jaminannya. Akan tetapi hal yang lebih penting adalah komitmen untuk melaksanakannya.

Hal yang kedua merupakan persoalan yang sangat penting, karena lembaga inilah yang akan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan saksi. Dalam naskah akademik UU Perlindungan Saksi dan Korban, di tawarkan tiga alternatif ;

- a. Merupakan bagian atau unit khusus dalam lembaga kepolisian.
- b. Merupakan unit khusus dalam KOMNAS HAM
- c. Merupakan lembaga tersendiri.

Alternatif terakhir dianggap oleh banyak pihak maupun pakar, antara lain Harkristuti Harkrisnowo, sebagai pilihan yang terbaik karena lembaga ini sangat penting sehingga membutuhkan indepedensi. Kemandirian yang dimilikinya diharapkan akan dapat membuat lembaga ini mampu memberikan penilaian secara objektif bilamana saksi dan korban membutuhkan perlindungan dan bantuan.¹³

Adanya hak-hak dalam UU saja tentunya belum merupakan jaminan bagi saksi dan korban akan mendapat perlindungan yang sesungguhnya. Telah banyak contoh mengenai betapa sulitnya mengimplementasikan ketentuan perundang-undangan, terutama yang berkaitan dengan pemberian hak. Sebagai contoh konkrit, hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Setelah lebih dari dua dasawarsa KUHAP berlaku, namun pemberian hak-hak kepada

¹³ Harkristuti Harkrisnowo, "Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana dan Urgensi Pengaturan Perlindungan Bagi Mereka", 29 Oktober 2009, www.Pemantauperadilan.com, diunduh 28 Februari 2011, pukul 11:18:39 PM

tersangka/terdakwa yang menjadikan karya agung ini bercirikan pengedepanan hak asasi manusia, belum juga terlaksana dengan baik. Jangankan pendampingan oleh penasihat hukum, yang memang membutuhkan dana dan fasilitas pun, masih sangat jauh dari harapan. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya berita tentang penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan tersangka/terdakwa dan juga gugatan praperadilan mengenai prosedur penangkapan dan penahanan.

Oleh karena itu, masih timbul adanya kelemahan-kelemahan dalam produk peraturan perundangan-undangan maupun dalam praktik mengenai perlindungan atas korban tersebut, saat ini belum ada prosedur permohonan restitusi dan penjatuhan sanksi terhadap restitusi yang tidak dipenuhi oleh pelaku terorisme. Bertitik tolak dari uraian tersebut, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum mencerminkan prinsip *due process of law* dan prinsip *fair trial* dan *equality before the law* antara pihak korban dan pihak tersangka.

Berdasarkan uraian di atas, penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme dapat di implementasikan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan peraturan-peraturan normatif yang ada. Untuk itu, peneliti mengambil judul **"PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BESERTA IMPLEMENTASINYA"**.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Pembatasan masalah diperlukan agar dalam penyusunan skripsi ini dapat mengarah jelas dan terfokus pada permasalahan yang akan diteliti. Karena di sesuaikan dengan kemampuan dari penulis yang menyangkut hal atau aspek yang sangat luas baik secara konseptual maupun operasionalnya. Oleh sebab itu penelitian dibatasi pada :

1. Dalam hal melakukan penelitian ini, penulis memusatkan pada perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Mengenai implementasi dari pemberian perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme ini, di fokuskan pada dua institusi Pemerintah pusat yakni KOMNAS HAM dan Lembaga perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis akan mengemukakan beberapa masalah yang perlu dikaji. Permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kajian mengenai tindak pidana terorisme dalam perspektif normatif serta asas berlakunya peraturan hukum pidana terorisme ?
2. Bagaimana tinjauan perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme di Indonesia dari aspek normatif?
3. Bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Saksi Korban dan Komnas HAM dalam hak perlindungan kepada tersangka, terdakwa dan korban dalam tindak pidana terorisme ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian :

1. Untuk mengetahui tinjauan umum tentang perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui implementasi dari sisi normatif serta lembaga institusi Pemerintah mengenai perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme.

b. Manfaat Penelitian :

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme.
- b) Sebagai bahan untuk melengkapi hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme.

2. Manfaat Praktis

- a) Dari hasil penelitian dapat diharapkan manfaat pada upaya pemberian perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme.
- b) Dari hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi kemajuan lembaga penegak hukum dalam memberikan perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme.

D. Kerangka Pemikiran

Pembukaan UUD 1945 menyatakan bahwa, negara Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka Indonesia harus berperan aktif dan berkontribusi di dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sebagaimana yang telah tertuang di dalam piagam PBB. Indonesia bersikap dan mendorong agar PBB berperan secara aktif dan konstruktif di dalam upaya pemberantasan terorisme internasional. Indonesia juga berpendapat bahwa langkah-langkah yang bersifat multilateral perlu lebih dikedepankan. Dunia tidak boleh hanya memerangi terorisme yang terlihat di permukaan, tetapi juga harus menyentuh akar masalah dan penyebab utamanya, seperti ketimpangan dan ketidakadilan yang masih dirasakan oleh banyak kalangan di masyarakat internasional.¹⁴

Perkembangan dunia global yang sekarang ini tidak lagi mengenal batas-batas wilayah negara dan dengan mengingat kemajuan teknologi yang semakin canggih serta kemudahan transportasi yang memungkinkan orang dengan mudah memasuki suatu negara yang hendak ditujunya, maka penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan perlu dilakukan. Adanya aksi terorisme yang terjadi di beberapa negara baru-baru ini telah membuat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menempatkan terorisme sebagai tindak pidana dengan status Kejahatan Internasional dengan demikian pengaturan hukum mengenai kejahatan terorisme perlu memperhatikan kebiasaan-kebiasaan dan

¹⁴ Ewit Soetriadi, *Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Dengan Hukum Pidana*, 2008, [Eprints_undip.ac.id/172911/EWITSOETRIADI](http://eprints.undip.ac.id/172911/EWITSOETRIADI), Diunduh 13 Maret 2011, pukul 17.45.

kepentingan internasional di samping juga memperhatikan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara masing-masing.

Negara-negara anggota PBB perlu bekerja sama menangani masalah terorisme dengan mengingat aksi-aksi terorisme sampai dengan sekarang ini masih terus terjadi dan meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya serta semakin menjadi ancaman serius terhadap prinsip-prinsip perdamaian dunia sebagaimana termaktub dalam piagam PBB. Pendekatan komprehensif untuk mengatasi terorisme merupakan suatu hal yang sangat penting mengingat multi aspek yang melingkupi kejahatan terorisme berbagai aksi-aksi terorisme yang sudah tidak mengenal batas-batas Negara merupakan fakta yang harus dihadapi oleh masyarakat internasional, oleh karena itu mutlak dilakukan aktifitas bersama baik melalui kerjasama bilateral maupun multilateral untuk mengcounter terorisme melalui penegakan hukum (*Law Enforcement*), intelijen (*Intelligence*) dan keamanan (*Security*).

Teror berasal dari bahasa latin, *terrere* yang diterjemahkan dalam bahasa inggris menjadi *to frighten*, yang terjemahan bebasnya dalam bahasa Indonesia adalah menakutkan, mengerikan. Sebelumnya, perang yang membahayakan nyawa manusia menjadi lebih terkendali, karena perang masih diatur dengan satu kodifikasi. Di dalam hukum perang misalnya dilarang menjadikan tempat-tempat tertentu dan orang-orang sipil sebagai target operasi. Sedangkan organisasi teroris baik asalnya maupun cara kerjanya, sukar untuk di pantau. Gerakan teroris mempunyai perangkat keras (*hard ware*) dan perangkat lunak (*soft ware*). Perangkat kerasnya antara lain senjata, alat-alat peledak, bahan-bahan kimia yang

mematikan. Sedangkan perangkat lunaknya adalah bagaimana melaksanakan strategi dan manuver untuk mencapai tujuan pemusnahan manusia/kelompok.¹⁵

Banyak pendapat yang mencoba mendefinisikan Terorisme, satu di antaranya adalah pengertian yang tercantum dalam Pasal 14 ayat 1 The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions) act, 1984, sebagai berikut: "Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the publik or any section of the publik in fear." Kegiatan Terorisme mempunyai tujuan untuk membuat orang lain merasa ketakutan sehingga dengan demikian dapat menarik perhatian orang, kelompok atau suatu bangsa. Biasanya perbuatan teror digunakan apabila tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk melaksanakan kehendaknya. Terorisme digunakan sebagai senjata psikologis untuk menciptakan suasana panik, tidak menentu serta menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kemampuan Pemerintah dan memaksa masyarakat atau kelompok tertentu untuk mentaati kehendak pelaku teror. Terorisme tidak ditujukan langsung kepada lawan, akan tetapi perbuatan teror justru dilakukan dimana saja dan terhadap siapa saja. Dan yang lebih utama, maksud yang ingin disampaikan oleh pelaku teror adalah agar perbuatan teror tersebut mendapat perhatian yang khusus atau dapat dikatakan lebih sebagai *psy-war*.¹⁶

Menyadari sedemikian besarnya kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana Terorisme, serta dampak yang dirasakan secara langsung oleh Indonesia sebagai akibat dari Tragedi Bali, merupakan kewajiban Pemerintah

¹⁵ O.C Kaligis, 2003, *Terorisme Tragedi Umat Manusia*, Jakarta : O.C.Kaligis&Associated, hal. 6.

¹⁶ Loebby Loqman, 1990, *Analisis Hukum dan PerUndang-Undangan Kejahatan terhadap Keamanan Negara di Indonesia*, Jakarta : Universitas Indonesia , hal. 98.

untuk secepatnya mengusut tuntas Tindak Pidana Terorisme itu dengan memidana pelaku dan aktor intelektual dibalik peristiwa tersebut. Hal ini menjadi prioritas utama dalam penegakan hukum. Untuk melakukan pengusutan, diperlukan perangkat hukum yang mengatur tentang Tindak Pidana Terorisme. Menyadari hal ini dan lebih didasarkan pada peraturan yang ada saat ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) belum mengatur secara khusus serta tidak cukup memadai untuk memberantas Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk membentuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yaitu dengan menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) nomor 1 tahun 2002, yang pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang dengan nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Keberadaan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di samping KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), merupakan Hukum Pidana Khusus. Hal ini memang dimungkinkan, mengingat bahwa ketentuan Hukum Pidana yang bersifat khusus, dapat tercipta karena :

1. Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Karena pengaruh perkembangan zaman, terjadi perubahan pandangan dalam masyarakat. Sesuatu yang mulanya dianggap bukan sebagai Tindak Pidana, karena perubahan pandangan dan norma di masyarakat, menjadi termasuk Tindak Pidana dan diatur dalam suatu perundang-undangan Hukum Pidana.

2. Undang-Undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan Undang-Undang yang telah ada dianggap memakan banyak waktu.
3. Suatu keadaan yang mendesak sehingga dianggap perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk segera menanganinya.
4. Adanya suatu perbuatan yang khusus dimana apabila dipergunakan proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktian.

Sebagai Undang-Undang khusus, berarti Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 mengatur secara materiil dan formil sekaligus, sehingga terdapat pengecualian dari asas yang secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)/Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), "(lex specialis derogat lex generalis)". Keberlakuan *lex specialis derogat lex generalis*, harus memenuhi kriteria :¹⁷

1. bahwa pengecualian terhadap Undang-Undang yang bersifat umum, dilakukan oleh peraturan yang setingkat dengan dirinya, yaitu Undang-Undang.
2. bahwa pengecualian termaksud dinyatakan dalam Undang-Undang khusus tersebut, sehingga pengecualiannya hanya berlaku sebatas pengecualian yang dinyatakan dan bagian yang tidak dikecualikan tetap berlaku

¹⁷ Wikipedia Bahasa Indonesia, *Terorisme*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Terorisme>, Diunduh 16 maret 2011, pukul 02.36

sepanjang tidak bertentangan dengan pelaksanaan Undang-Undang khusus tersebut.

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian, kita tidak akan terlepas dari penggunaan metode. Karena metode merupakan cara atau jalan bagaimana seseorang harus bertindak. Metode dapat dirumuskan suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan, cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.¹⁸

Dengan demikian metode penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan untuk mendapatkan suatu data dari objek penelitian, yang kemudian data tersebut akan diolah guna mendapatkan data yang lengkap dan hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Adapun yang menyangkut tentang metodologi penelitian dari penelitian ini meliputi:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Yaitu bermaksud memberikan gambaran secara jelas mengenai perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme..

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif empiris, penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dan kenyataan yang terjadi di lapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam prakteknya.

¹⁸ Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiyono, 2004, *Metode Penelitian hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 1.

3. Jenis sumber data

Agar memperoleh data/bahan yang valid penulis menggunakan sumber penelitian hukum:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari lapangan, dengan mengadakan tinjauan langsung pada objek yang diteliti dalam hal ini adalah keterangan dari para pihak yang berhubungan dengan perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang secara langsung mendukung data primer yaitu buku-buku, dokumen, doktrin, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang mendukung dan berkaitan dengan tugas ini adalah:

a. Studi Kepustakaan

Merupakan suatu tehnik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

b. Wawancara

Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan pihak-pihak yang bersangkutan mengenai perlindungan hak tersangka, terdakwa, dan korban tindak pidana terorisme, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis.

5. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data yang diperlukan, maka perlu suatu teknik analisa data yang tepat. Data yang telah terkumpul tersebut diolah dan dianalisa guna memecahkan masalah-masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tahap analisa ini merupakan faktor yang penting karena dapat mempengaruhi mutu hasil penelitian. Analisa yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data kualitatif, yaitu : “Suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh “.¹⁹

Analisis data yang menggunakan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, dan bahan pustaka lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kemudian didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai kesatuan yang utuh kemudian dilakukan reduksi data atau pengolahan data menghasilkan sajian data penelitian hukum sehingga akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.

¹⁹ Soekanto, 1986, *Meninjau Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Binacipta, Hal. 242.

G. Sistematika Skripsi

Skripsi ini akan disusun dalam format empat bab :

Bab I berisi pendahuluan, yang memuat cakupan latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II berisi tinjauan pustaka, terdiri dari tinjauan umum tindak pidana, asas berlakunya peraturan hukum pidana, serta pengertian dan sejarah terorisme.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai tindak pidana terorisme dalam perspektif normatif, asas berlakunya hukum pidana tentang tindak pidana terorisme, perlindungan secara normatif tentang hak tersangka, terdakwa, dan korban dalam tindak pidana terorisme di Indonesia serta peranan lembaga perlindungan saksi korban dan komnas HAM dalam hak perlindungan tersangka, terdakwa dan korban tindak pidana terorisme

Bab IV merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran.